

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pelebagaan partai saat ini tengah menjadi salah satu alat tolak ukur didalam suatu partai, mengukur sejauh mana partai ini dapat berdiri dan bertahan. Menurut Huntington, pada negara berkembang yang mencapai derajat stabilitas yang tinggi paling tidak memiliki satu partai politik yang berwibawa. (Dalam Pamungkas : 2011)

Mengapa pelembagaan ini penting sebagai tolak ukur suatu partai? Karena jika pelembagaan didalam suatu partai buruk, maka profesionalisme dan pengelolaan partai ini pun buruk. Begitu pun sebaliknya, apabila sistem pelembagaan partainya baik maka berdampak baik pada internal partai dan juga pada eksternal partai. (Akbar : 2014)

Hal ini pula dapat menjadi tolak ukur keberadaan demokrasi di suatu negara. Sistem demokrasi suatu negara bergantung pada wajah partai politik di negara tersebut. Ketika wajah demokrasi disatu negara baik maka berarti pelembagaan dari partai politik ini baik, sebaliknya apabila wajah demokrasi buruk maka sistem pelembagaan dari partai politik buruk.

Partai politik dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang dibangun atas dasar kepentingan para elit politik itu sendiri.

Selanjutnya didalam partai politik itu sendiri terdapat keinginan penguasaan, struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui pemilihan umum. Didalam definisi ini dapat dijelaskan bahwa partai politik ini merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat struktur, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin (anggota). Pemimpin ataupun anggota didalam organisasi ini harus mengikuti dan mentaati semua peraturan ataupun batasan-batasan sebagai bagian didalam organisasi tersebut dan adanya perintah bagi partai politik untuk melakukan perjuangan nilai ataupun ideologi suatu partai.

Adapun pengertian partai politik menurut Undang-undang RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 1, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partai-partai di Indonesia sering menghadapi masalah serius, salah satunya adalah lemahnya sistem kelembagaan didalam sebuah partai.

(Akbar : 2014)

Lemahnya adalah kelembagaan tersebut tidak diadakan secara menyeluruh di dalam tubuh partai tersebut.

Setidaknya ada tiga kelemahan partai politik di Indonesia, menurut Surbakti. Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya, akan tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lainnya. Kedua, secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai dari pada organisme yang hidup sebagai organisasi anggota. Ketiga, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas terhadap publik. (Akbar :2014 *dalam* Surbakti:2002)

Wajah partai politik saat ini hanya tercermin dari saat adanya pemilu, akan tetapi ada satu hal yang sampai saat ini luput dari pandangan masyarakat, yaitu bagaimana keadaan partai politik ini setelah diadakannya pemilu, rutinitas seperti apa yang dilakukan partai politik dalam kesehariannya. Dalam hal, bagaimana pembentukan dan penanaman ideologi dari partai politik itu sendiri, kebijakan seperti apa yang dibuat serta latar belakang para anggota partai. Latar belakang dari para anggota partai ini penting, sebab nantinya mereka yang akan duduk dikursi legislatif dan bakal calon kepala daerah nantinya.

Partai Golongan karya (disingkat-Golkar) merupakan salah satu partai yang memiliki jenjang karir di ranah politik dalam jangka waktu yang lama. Sejak berdirinya partai ini pada tahun 1964 (sekber

Golkar) sampai saat ini. Partai Golkar masih mampu melebarkan sayap dan meraih suara di Pemilu dengan jumlah yang besar.

Pada awal pemilu di tahun 1971 partai Golkar pertama kali mengikuti pemilu di Indonesia, kemudian pada saat partai Golkar mendapat anggapan remeh dari pihak partai politik, pihak parpol meragukan kemampuan partai Golkar dalam komunikasi politik pada Grassroot setingkat partai NU, PNI dan Parmusi. (Tandjung : 2007)

Pada Pemilu 2014 Golkar masih merupakan salah satu partai yang dapat meraih simpati yang cukup banyak dari masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil presentase suara partai, Golkar meraih suara 14,71% dibawah dari partai PDIP yang memperoleh hasil 18,97%. (www.kpu.go.id)

Partai Golkar merupakan salah satu partai yang menarik untuk diteliti sistem pelebagaannya, menariknya adalah mengapa sampai saat ini partai Golkar masih bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, padahal mengingat banyaknya elit partai yang melakukan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Dari data KPK partai Golkar menempati urutan kedua sebagai partai yang kader maupun anggota terbanyak korupsi di negeri ini, dengan jumlah 27 orang. Masing-masing kader dan anggota partai Golkar itu sendiri berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia. (www.rajabasanews.com)

Melihat hal ini, dapat dibayangkan berapa jumlah kerugian keuangan di Indonesia. Apa penyebab dari layaknya partai ini masih saja memiliki kekuatan suara besar dimasyarakat Indonesia.

Promosi partai Golkar melalui peran media mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat masih memberikan kepercayaan serta hak suara memilih mereka untuk partai Golkar, janji politik yang sangat baik dibuat untuk menarik perhatian.

Pentingnya peran media massa bahwa media menjadi ekstensi/perluasan manusia. Artinya. Apa yang dipikirkan, diinginkan manusia bisa diperluas perwujudannya melalui media massa. Bahkan media massa membuat lebih dari apa yang bisa manusia lakukan. Oleh karenanya media massa menjadi salah satu faktor penting bagi partai Golkar untuk mempromosikannya. (Nurudin : 2006).

Partai Golkar merupakan salah satu partai massa, dengan basis dukungan massa yang sangat banyak hingga saat ini, dukungan massa ini tidak lepas dari figur para kader politik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional yang sampai saat ini mendapat citra publik yang baik. (Akbar : 2014)

Kemudian, dalam bidang keuangan dari partai Golkar sendiri yakni sumber pendanaan keuangan. Sumber pendanaan partai ini berasal dari iuran anggota, sumbangan sah yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah. (www.partaigolkar.or.id)

Peran ketua umum dewan pimpinan pusat partai Golkar, Aburizal Bakrie yang dulunya pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Peran ketua umum tentunya akan sangat berpengaruh hingga ke tingkat kepengurusan di daerah. Sama seperti halnya di Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo, yang pada tahun 2011 silam telah melaksanakan pemilihan gubernur, dengan gubernur terpilih ialah pasangan dari Partai Golkar dan PPP yakni Rusli Habibie dan Idris Rahim periode 2011-2016, terpilihnya pasangan calon yang dicalonkan partai Golkar dan PPP ini tentunya tidak luput dari peranan para kader partai Golkar itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa sosok para kader Golkar sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Gorontalo. Peranan kader ini memberikan sumbangsi pada saat pemilu, yakni bagaimana para kader turun langsung melakukan sosialisasi dalam hal ini memberikan informasi tentang figur dari gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan

Figur dari Rusli Habibie itu sendiri tidak luput dari sorotan masyarakat Gorontalo, dengan membawa satu slogan politik yaitu "Berkarya Nyata bukan Berkarya Kata". Semboyan itu kemudian direalisasikan oleh Rusli Habibie sebelum menjadi bakal calon Gubernur yang di usung partai Golkar dan tidak luput pula semboyan Golkar "Suara Golkar Suara Rakyat" yang selalu disebut disetiap

kampanye menjadikan sebuah kepaduan yang semakin membuat masyarakat meyakini sosok Rusli Habibie, semboyan ini di realisasikan pada saat Rusli Habibie menjadi calon Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara periode 2008-2013.

Seperti visi dan misi yang diemban oleh Rusli Habibie yaitu, Visi:

“Gorontalo Utara sebagai Kekuatan Perekonomian di Pantai utara Laut Sulawesi.” Misi: 1. Mengedepankan potensi kualitas SDA Kab. Gorontalo Utara. 2. Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan. 3. Mengembangkan sistem perekonomian yang tangguh berbasis kerakyatan (Gerbang Emas-Gerakan Pembangunan ekonomi Masyarakat). 4. Mengembangkan nilai-nilai religi dalam konteks keberagaman adat istiadat/ nilai-nilai budaya. 5. Menciptakan jejaring kerjasama ekonomi dengan menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah lintas pengembangan perekonomian segitiga emas.(www.gorontalo.com)

Melihat dari semua karya nyata yang dijanjikan oleh sosok Rusli Habibie setelah terpilih menjadi Bupati Gorontalo Utara inilah yang kemudian menjadikan citra figur Golkar menjadi sangat baik dimata publik (masyarakat), salah satu karya nyata yang dilaksanakan oleh Rusli Habibie dan Indra Yasin ini adalah pembangunan dan peningkatan jalan di Kab. Gorontalo Utara.

Kini Rusli Habibie mengemban 2 amanah sekaligus, yakni sebagai Gubernur dan juga sebagai ketua DPD I Golkar. Dewan Pimpinan

Daerah Partai Golkar Provinsi Gorontalo memiliki 70 personalia. Masa bakti 2009-2015 yang disahkan, nomor: Kep-191/DPP/Golkar/VIII/2012 pada tanggal 16 Agustus 2012. (Arsip Partai Golkar. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. No: Kep-191/DPP/VIII/2012)

Di dalam internal DPD I partai Golkar ini sendiri tidak luput dari berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Akan tetapi yang perlu penulis tekankan berdasarkan wawancara dengan salah satu kader partai Golkar Lahidjun bahwa dalam partai Golkar ini sendiri jarang di temui masalah-masalah dalam internal partai, masalah yang sering muncul seperti perebutan nomor urut para Kader ketika Pemilu akan di adakan. Kader di partai Golkar ini benar-benar mengemban satu sikap yaitu loyalitas terhadap partai, jadi ketika ada kader yang tidak loyal lagi terhadap partai Golkar maka yang terjadi adalah adanya pemecatan langsung dari ketua umum DPD I Golkar. Seperti misalnya adanya pemecatan dua kader partai Golkar menjelang Pemilihan Gubernur. Dua kader ini adalah Ishak Liputo dan Adhan Damba. Kedua kader ini dipecat karena tidak menjalankan tugas dengan baik dan adanya kecemburuan sosial yakni kader tersebut tidak dapat menerima calon Gubernur yang diusung oleh para kader partai Golkar lainnya. Akan tetapi masalah ini kemudian dapat diatasi melalui internal partai itu sendiri dan juga melalui Mahkamah Partai Politik.

Masih dengan contoh masalah internal partai, pada saat pemilihan ketua DPRD di Kabupaten Boalemo. Perebutan kursi ketua DPRD oleh 2 dari 5 orang anggota DPRD terpilih dari partai Golkar membuat adanya kubuh-kubuh yang memilih kedua anggota DPRD ini. Oktahari Dalango dan Djafar Latief Kulo adalah kedua anggota DPRD yang memperebutkan kursi ketua DPRD. Akan tetapi dalam hal ini melalui DPP (Dewan Pertimbangan Partai) Oktahari Dalango lah yang terpilih menduduki kursi ketua DPRD Boalemo.

Contoh masalah yang sama, masih dengan perebutan kursi kekuasaan, yakni pada saat Pemilihan Gubernur di Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie adalah calon dari partai Golkar, akan tetapi ada juga kader dari partai Golkar ini yang mencalonkan diri menjadi bakal calon di Pemilihan Gubernur nanti, yaitu Toni Uloli, Toni Uloli yang pada saat itu menjadi calon wakil gubernur Gorontalo, dengan pasangannya yakni Nelson Pomalingo. Saat itu terjadilah perebutan hak suara untuk mendapatkan persetujuan dari kader-kader partai Golkar untuk menjadi bakal calon dari Golkar menuju pemilihan Gubernur Gorontalo. Terciptanya kubuh dari Rusli Habibie dan kubuh dari Toni Uloli, pada akhirnya Rusli Habibie lah yang terpilih sebagai calon Gubernur Gorontalo. Putusan ini dilakukan dan dibuat atas dasar hak dan mekanisme rapat DPP.

Setelah terpilihnya Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo, terjadi masalah lagi di tubuh partai Golkar yakni adanya kader-kader

yang dulunya dari kubuh Ruslie Habibie, yang kemudian sengaja memanfaatkan keadaan dengan terpilihnya Rusli Habibie sebagai gubernur. Kader ini sengaja mencari proyek-proyek pemerintah melalui gubernur yang akhirnya dengan sangat merasa malu dan marah Rusli Habibie langsung menegur sikap kapitalisme yang ada pada kader-kader tersebut.

Perebutan nomor urut pada saat pemilihan anggota legislatif pun menjadi satu masalah dalam partai Golkar yang tidak dapat dihindara, hal ini selalu terjadi dalam tubuh partai Golkar. Akan tetapi partai Golkar sendiri memberikan persyaratan khusus yang dibuat dan disepakati bersama oleh para kader partai Golkar. Syarat-syarat tersebut ialah:

- ❖ Melihat dari jabatan struktural dari para caleg-caleg tersebut.
- ❖ Jenjang karir pendidikan dari para caleg. Partai Golkar mengeluarkan peraturan tersendiri tentang jenjang pendidikan ini yakni caleg di DPRD Kabupaten/Kota pendidikan terakhirnya minimal SMA, caleg di DPRD Provinsi minimal D3 dan caleg di DPR RI minimal S1.
- ❖ Loyalitas terhadap partai Golkar.

Ada masalah internal partai tentunya ada pula masalah eksternal partai. Permasalahan yang terjadi di lintas partai sampai dengan saat ini di Provinsi Gorontalo yang terjadi hanyalah masalah perebutan

kekuasaan yang melalui Pemilu di Provinsi Gorontalo. Masalah ini sama halnya dengan masalah-masalah lintas partai di Provinsi lainnya.

Selanjutnya adalah sumber pendanaan dari partai Golkar di Provinsi Gorontalo itu sendiri diperoleh dari:

1. Sumbagan APBD Gorontalo
2. Dana Fraksi yakni potongan sekian persen dari gaji penghasilan para kader partai Golkar yang menjabat sebagai Kepala Daerah maupun anggota legislatif
3. Swadaya pengurus.

Penelitian ini mengenai pelebagaan partai yang dispesifikasikan pada kasus pelebagaan partai Golkar di Provinsi Gorontalo dalam pengetahuan atau citra publik dari partai Golkar itu sendiri di mata masyarakat Gorontalo. Penelitian ini menggunakan teori dari Randal dan Svasand pada dimensi keempat yakni aspek reifikasi (pengetahuan atau citra publik).

Pengertian serta citra publik yang dibangun saat ini oleh partai Golkar di Gorontalo adalah dengan adanya peranan figur dari kader-kader partai Golkar itu sendiri. Pencitraan publik yang terus menerus dilakukan oleh partai Golkar membuat partai ini kembali memenangi Pemilihan Walikota Gorontalo yang dimenangi oleh pasangan Marten Taha dan Budi Doku dengan jumlah suara 52,48%.
(www.gorontalo.tribunnews.com)

Kemenangan partai Golkar disetiap pemilu di Provinsi Gorontalo bukanlah menjadi sebuah omongan belaka ataupun cita-cita yang masih ingin diraih, melainkan kesemuanya telah dibuktikan oleh kader partai Golkar, bahwasanya partai ini merupakan partai yang basis massanya tidak sedikit serta peran tim kampanye sebagai jembatan pencitraan figur-figur yang dijual dari partai Golkar ini tidak luput dari penyebab kemenangan partai Golkar di Gorontalo.

Hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana partai Golkar akan terus mempertahankan citra baik dari figur-figur seperti Rusli Habibie, Marten Taha, Paris. R.A. Jusuf dan kader-kader partai Golkar lainnya untuk tetap bercitra baik di mata masyarakat Gorontalo, hingga kemudian partai Golkar akan kembali menemukan pengganti (generasi penerus) agar terus membangun citra baik di masyarakat dan turut andil dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan membahas permasalahan pokok dengan mengacu pada fokus pertanyaan yakni:

“Bagaimana Pelembagaan Partai Golkar pada pengetahuan atau citra publik partai Golkar di masyarakat.” Penelitian ini mengacu pada teori reifikasi dari Randal dan svasand, aspek keempat yakni seberapa kemampuan partai memberikan citra ke publik.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelebagaan partai Golkar dalam hal ini yaitu pengetahuan serta citra publik partai Golkar terhadap masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelebagaan pada tubuh partai Golkar di Provinsi Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat akademisi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai proses pelebagaan DPD Partai Golkar dalam pengetahuan atau citra publik yang dibangun oleh partai Golkar itu sendiri ditengah-tengah masyarakat Gorontalo.
- b. Dalam konteks akademisi, penelitian ini akan memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan khususnya tentang studi partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana pengembangan keilmuan bagi penulis sendiri.
- b. Memberi informasi kepada masyarakat dalam memahami realitas yang terjadi pada partai politik dewasa ini.

- c. Agar menjadi masukan dan referensi bagi para politisi khususnya DPD partai Golkar Gorontalo dalam memperkuat pelebagaan partai.
- d. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik.

E. Kajian Teori

❖ Pelebagaan Partai

Ada beberapa teori tentang pelebagaan partai:

1. Teori pelebagaan partai menurut Hungtinton

Ada 4 dimensi pelebagaan partai politik:

- a. Penyesuaian diri dan kekakuan. Apabila semakin muda suatu organisasi atau tata cara untuk dapat menyesuaikan dirinya, maka akan semakin tinggi pula tingkatan pelebagaan organisasi tersebut. Sebaliknya, apabila partai tersebut kurang dapat menyesuaikan diri atau bahkan lebih kaku, pelebagaannya akan semakin rendah.
- b. Kompleksitas dan kesederhanaan. Apabila semakin kompleksnya suatu organisasi, akan semakin tinggi pula tingkat pelebagaan organisasi tersebut.
- c. Otonomi-subordinasi. Pelebagaan dapat mengukur, tingkatan sejauh mana organisasi politik beserta prosedurnya tidak bergantung dari satu kelompok sosial dan juga metode

perilaku yang lainnya. Perilaku organisasi yang otonom ini memiliki sebuah kemandirian dan nantinya terbebas dari pengaruh ataupun provokasi kelompok sosial lain.

- d. Kesatuan dan perpecahan. Semakin terpadu dan utuhnya suatu organisasi maka, akan semakin tinggi tingkat pelebagaan dari organisasi itu dan semakin terpecah organisasi maka, akan semakin rendah pula tingkat pelebagaannya.

(Pamungkas : 2011)

2. Randall dan Svasand, mengartikan lebih secara spesifik tentang pelebagaan partai politik, menurut Randall dan Svasand pelebagaan partai politik ialah "*The process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and attitudes and culture*". Jadi pelebagaan suatu partai politik ialah proses pemantapan bagi partai politik baik itu secara struktural yakni dalam rangka mempolakan perilaku sacara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Menurutnya, proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural yang saling bertemu dalam persilangan sehingga menghasilkan aspek kesisteman dari keduanya. (Pamungkas : 2011)

Tabel 1.1

Dimensi pelebagaan partai politik vesri Randall dan Svasand

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Kebijakan
Ke-sikap-an	Identitas nilai	Reifikasi

Perbandingan diantara kedua teori diatas, dalam teori yang dikemukakan Hungtinton dibutuhkan oleh suatu partai politik dalam proses pelebagaannya. Akan tetapi dalam teori Hungtinton belum adanya pengkhususan, belum tertuju pada satu acuan karena dengan melihat teori yang dikemukakan oleh Randal dan Svasand teori-teori yang dikemukakannya tertuju pada satu fokus tujuan pada tiap aspeknya. Jadi dengan begitu penulis memilih menggunakan teori yang di kemukakan Randal dan Svasand yang dapat dijadikan acuan pada penelitian ini. Dapat dilihat dengan jelas bahwa teori Randal dan Svasand sangat mengerucut tertuju pada satu fokus penelitian ditiap aspek-aspeknya.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Randal dan Svasand, mengacu pada teori aspek ke empat yakni, reifikasi (citra public) penulis menggunakan aspek ini dikarenakan titik fokus penelitian di DPD I Golkar hanya

meneliti tentang citra publik (dalam teori pelebagaan Randal dan Svasand yakni dimensi reifikasi) partai Golkar di tengah-tengah masyarakat Gorontalo.

❖ Partai Politik

Menurut Friedrich partai politik adalah "*a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaning for it's leades the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits advantages.*"

Artinya adalah suatu partai politik merupakan sekelompok manusia yang teratur dengan stabil yakni memiliki tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai tersebut berdasarkan penguasaan ini senantiasa memberikan manfaat bagi anggota partainya, idealisme ataupun kekayaan material dan juga perkembangan lainnya. (Syafie dan Azhari : 2005)

Sementara menurut Budiarmo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiarmo : 2008)

Fungsi dari partai politik itu sendiri menurut Meny dan Knapp, mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), sarana rekrutmen politik dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. (Meny and Knapp : 1998)

Sedangkan fungsi partai politik menurut Arifin meliputi:

1. Sosialisasi Politik: berfungsi sebagai dari seseorang dari mana memperoleh sikap orientasi terhadap fenomena politik yang pada umumnya berlaku di masyarakat dimana ia berada. Proses ini biasanya dilakukan dari sosialisasi yang secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
2. Partisipasi Politik: memiliki fungsi yakni mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Biasanya suatu partai politik melakukan indoktrinisasi ideologi, dasar (*platform*), asas partai kepada anggota dan masyarakat yang ada didalam jangkauan partainya.
3. Komunikasi Politik: berfungsi sebagai penyalur keanekaragaman pendapat dan aspirasi dari masyarakat dan mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketidakjelasan pendapat berkurang dalam masyarakat.
4. Artikulasi Kepentingan: berfungsi menyampaikan kepentingan masyarakat pada badan-badan politik dan

pemerintah melalui kelompok yang dibentuk bersama orang lain atas dasar kepentingan yang sama.

5. Agregasi Kepentingan: berfungsi memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat kemudian dirumuskan menjadi program politik, selanjutnya di usulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka bila nanti kepentingan kelompok itu mau menjadi pendukung dari calon tersebut.
6. Pembuat Kebijakan: fungsi ini dimiliki suatu partai politik setelah partai politik ini meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud ialah adanya kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah meraih kekuasaan ini partai politik akan memberikan pengaruhnya dalam pembuatan kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan. (Arifin : 2007)

Selain fungsi, partai politik dapat di klasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni:

1. Pragmatis: suatu partai politik tidak memiliki program kegiatan yang terikat pada suatu doktrin tertentu.
 2. Doktrin: Partai politik memiliki program kegiatan yang terikat pada suatu doktrin tertentu.
 3. Kepentingan: suatu partai politik memiliki program dan kepentingan yang berasal dari pimpinannya.
- (Abdussamad : 2006)

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan dengan memberikan pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar, tidak terjadi kesalahpaman. Digunakan konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. (Abdussamad : 2006)

Dalam definisi Konsepsional penulis menggunakan:

1. Pelembagaan partai adalah suatu alat tolak ukur yang dijadikan untuk mengukur sejauh mana suatu partai dapat bertahan dan tetap berdiri ditengah-tengah masyarakat.

2. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk mencapai suatu tujuan yaitu kekuasaan.
3. Reifikasi adalah citra suatu partai yang tercipta dan tertanam didalam masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat di nilai kesetiannya pada suatu partai serta dukungan dari masyarakat untuk partai tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, definisi ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul-judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pelebagaan Partai Golkar di Provinsi Gorontalo Dalam Dimensi Citra Publik (studi kasus DPD I partai Golkar)", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Dimensi Kesisteman (*systemness*) dalam dimensi ini menjelaskan tentang kesisteman yang ada didalam partai Golkar Provinsi Gorontalo, kesisteman yang dimaksud ialah dalam tubuh partai Golkar bagaimana mendapatkan sumber daya dalam hal pendanaan kemudian bagaimana figur dari seorang pimpinan dalam struktur partai Golkar.

Faksionalisme menjadi faktor selanjutnya dari dimensi Kesisteman, yakni siapa yang menjadi penentu dalam pembentukan fraksi-fraksi dalam tubuh Partai Golkar dan yang terakhir ialah implikasi klijentalisme yakni bagaimana partai Golkar ini memelihara hubungan dengan anggota dan para pendukung (simpatisan) partai Golkar.

2. Dimensi Identitas Nilai Partai Politik (*value infusion*) dalam dimensi ini menjelaskan tentang bagaimana dasar ideologi dan platform dari partai, basis sosial pendukung partai Golkar dan pengidentifikasian anggota partai Golkar. Dimensi Identitas Nilai Partai Politik ini berhubungan dengan hubungan partai Golkar dengan populis tertentu yakni apakah partai Golkar ini mendapat dukungan dari populasi atau kelompok-kelompok tertentu.
3. Dimensi Otonomi Kesisteman (*decisional autonomy*) dalam dimensi ini berkaitan dengan hubungan partai Golkar dengan aktor diluar partai (penguasa dan pengusaha, lembaga luar partai). Hal terpenting ialah apakah partai Golkar tergantung pada aktor penguasa dan apakah pengambilan keputusan dari partai Golkar ini ditentukan oleh aktor luar.

2. Obyek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Provinsi Gorontalo dengan objek penelitian partai Golkar. Pelembagaan dalam partai merupakan hal sangat penting karena pelembagaan inilah yang membuat partai ini mampu atau tidak dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya. Dalam intitusional partai kompleksitas masalah yang muncul merupakan hal yang wajib diselesaikan. Pelembagaan pengetahuan atau citra publik seperti apa yang dibangun oleh partai Golkar dimata masyarakat Gorontalo.

3. Jenis data.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Keterangan ini diperoleh dari Ketua Umum Partai Golkar DPD I dan wakil-wakil ketua partai (bidang Pemenangan Pemilu, Pengabdian Masyarakat dan bidang Informasi dan Komunikasi).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung data penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung dari berbagai pandangan, opini dan penilaian dari para Kader partai Golkar tentang bagaimana strategi yang digunakan dalam membangun citra publik. Teknik wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan juga penulis akan mendapatkan informasi yang jelas.

Penulis akan mewawancarai beberapa responden yang memiliki peran kunci (*key person*) dalam masalah pencitraan Partai Golkar di masyarakat (publik). Seperti, sekretaris Partai Golkar, wakil ketua partai bidang Pemenangan Pemilu, wakil ketua partai bidang Pengabdian masyarakat, wakil ketua partai bidang Informasi dan Komunikasi dan wakil sekretaris bidang OKK

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

Nama	Jabatan
Urudin Bone, ST	Wakil Ketua Partai Bidang Pemenangan Pemilu
Dr. Jaene Manalib, MM	Wakil Ketua Partai Bidang Pengabdian Masyarakat
Dr. Budi Doku	Wakil Ketua Partai Bidang Informasi Dan Komunikasi
Dr. Paris P.A. Jusuf, S.Sos.I,M.Si	Sekretaris Partai Golkar
Moh. Ghalib I. Lahidjun	Wakil Sekretaris Bidang OKK

Penulis juga akan mewawancarai 20 orang masyarakat Gorontalo, 20 orang ini terdiri dari:

- 10 orang yang mendukung Partai Golkar, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang bertempat tinggal di daerah Kab. Bone-Bolango, Kec. Suwawa
- 10 orang yang tidak mendukung Partai Golkar, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang bertempat tinggal di daerah Kab. Bone Bolango, Kecamatan Tapa.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan turun langsung melakukan penelitian di DPD I Golkar Gorontalo.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penulis mendapatkan AD/ART partai Golkar, SK kepengurusan DPD partai Golkar Provinsi Gorontalo, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting oleh penulis.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data akan berlangsung hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini membantu peneliti dalam melihat kekurangan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sekaligus menarik dugaan-dugaan sementara yang akan dikaji secara

mendalam. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. sehingga dapat dipahami dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain.

Pertama, penulis akan mereduksi data yang telah dikumpulkan, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi, agar data akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Tahap selanjutnya hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil pengamatan lainnya akan dituliskan lebih teratur. Hal ini untuk mempermudah peneliti membaca dan mencermati data. Selain itu, juga mempermudah proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya menganalisis informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk memastikan keabsahan data.

Penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan merupakan akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada dengan

memperhatikan hasil wawancara dan dokumen berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajikan. Penarikan kesimpulan juga merupakan langkah untuk meringkas data dalam bentuk kesimpulan sehingga penulis dapat melihat data apa saja yang telah diperolehnya dan dapat mendukung penelitiannya serta menjawab permasalahan awal yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang masih bersifat kesimpulan sementara, selanjutnya dicermati untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penelitian akan berakhir ketika keseluruhan data sudah mencukupi sesuai tujuan penelitian.

(Faisal : 2005)

I. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari empat bab; meliputi:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat mengapa diadakannya penelitian ini, teori yang dipakai serta metode yang digunakan penulis dalam penelitian.

Bab II akan membahas tentang sejarah partai Golkar di Indonesia secara umum, sejarah partai Golkar di Gorontalo secara khusus dan struktur kepengurusan partai Golkar di DPD I Gorontalo

Bab III akan menjelaskan tentang sistem pelebagaan partai Golkar, respon dan penilaian masyarakat Gorontalo tentang partai Golkar.

Pengetahuan seperti apa yang diketahui masyarakat Gorontalo tentang

partai Golkar dan citra seperti apa yang dibangun selama ini oleh partai Golkar dikalangan masyarakat.

Bab IV merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari sebuah hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

Bab II

Deskripsi Lokasi Penelitian

A. Profil Provinsi Gorontalo

Gorontalo atau yang dulunya disebut Hulonthalo adalah provinsi ke 32 di Indonesia. Gorontalo yang dulunya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian memekarkan diri menjadi satu provinsi. Pada hakikatnya masyarakat Gorontalo memiliki nilai nasionalisme yang tinggi, hal ini di buktikan merdekanya provinsi ini dari masa penjajahan pada tanggal 23 Januari 1942, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Tepat pada tanggal 23 Januari 2000 provinsi Gorontalo resmi menjadi provinsi. Pada awal pemekaran menjadi provinsi tepat pada tanggal 16 Februari 2001, provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang pejabat gubernur yakni Tursandi Alwi. (Badan Pusat Statistik Gorontalo : 2013)

Setelah menjabat gubernur selama 6 bulan provinsi Gorontalo melakukan pemilihan gubernur pada tahun 2001. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail memenangi pemilihan gubernur periode 2001–2007 dan pada pemilihan gubernur pada periode berikutnya pasangan Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail kembali memenangi pemilukada periode 2007-2012. (www.gorontaloprov.go.id)